

## PENGARUH SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KUMUH TERHADAP KESADARAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MASYARAKAT

Oleh :

**Musfianawati**

Email : [musfianawati@gmail.com](mailto:musfianawati@gmail.com)

**Universitas Islam Jember**

**Firda Laily Mufid**

Email : [firdalaily25@gmail.com](mailto:firdalaily25@gmail.com)

**Universitas Islam Jember**

### **Abstrak**

*Keterkaitan antara pola hidup bersih dan sehat dengan indikator kekumuhan adalah saling berkaitan yaitu dalam indikator tentang pola hidup bersih dan sehat bahwa buang air besar harus di jamban, ketersediaan dan kualitas air bersih harus terpenuhi, masyarakat juga harus membuang sampah ditempat sampah termasuk juga seharusnya pengelolaan sampahnya dan termasuk pengelolaan limbah air rumah Kelurahan Bintoro menjadi Salah satu diantara beberapa kelurahan kumuh yang ada di Kabupaten Jember. Hal inilah yang mendorong kesadaran pada masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat yang telah dibangun sarana dan prasaranya mau menjaganya dan masyarakat yang tidak termasuk dibangun telah bersedia untuk membangun sarana dan prasaranya sendiri. Ada beberapa kriteria permukiman kumuh dan pola hidup bersih dan sehat yang terkait yaitu tentang ketersediaan jamban keluarga, terpenuhinya air bersih dan penanganan persampahan adalah menjadi bagian dari dua hal antara tidak lagi kumuh dan bisa dijalankannya pola hidup bersih dan sehat.*

**Kata Kunci :** Hidup, bersih, sehat

### **Abstract**

*The relationship between clean and healthy lifestyle with the indicators of slums is interrelated namely in the Indicators of clean and healthy living patterns that defecation must be in the toilet, the availability and quality of clean water must be met, the community must also dispose of waste in the garbage including the waste management should be and includes management of home water waste. Some areas that are determined based on government decrees encourage public awareness on clean and healthy lifestyles. And the community that has been built means and its infrastructure is willing to take care of it and the community that is not included has been prepared to build its own infrastructure and infrastructure. There are several criteria for slum settlements and related clean and healthy lifestyle, namely the availability of family latrines, the fulfillment of clean water and solid waste management. is to be a part of two things between no longer slums and the clean and healthy lifestyle.*

**Keywords:** Life, clean, healthy

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif serta negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan ke-

hidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup>

Manusia hidup di berbagaitatanan, yaitu berbagai tempatatau sistem sosial dimana ia melakukan kegiatan sehari-harinya. Di setiap tatanan, faktor-faktor individu, lingkungan sosial berinteraksi dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Oleh karena itu Pola hidup bersih dan sehat mencakup perilaku disemua tatanan harus diterapkan disemua masyarakat. Diantara indikator pola hidup bersih dan sehat adalah menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, Pengelolaan air minum, menggunakan jamban sehat, Pengelolaan limbah rumah tangga dan membuang sampah ditempat sampah.<sup>2</sup>

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan sertasarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.. <http://promkes.kemkes.go.id/phbs>, Diakses Tanggal 5 Januari 2020

<sup>3</sup> Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.<sup>4</sup>

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolabo-

rasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

## 1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji pada tulisan ini adalah apakah sebuah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang wilayah kumuh berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat?

## PEMBAHASAN

Berawal dengan pengetahuan bahwa kesehatan masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan, bisa dikatakan pula kesehatan masyarakat adalah sama dengan sanitasi. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan

---

Kumuh, [http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Pedoman/SE\\_40\\_DJ](http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Pedoman/SE_40_DJ)

[CK\\_pedoman\\_umum\\_KOTAKU.pdf](#), Diakses tanggal 2 Januari 2020

<sup>4</sup> Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, <http://ciptakarya.pu.go.id/kip/halaman/progker/file/1495186401-LaKIP%20II%20KOMPLIT%20HR.pdf>, Diakses Tanggal 3 Januari 2020

adalah merupakan kegiatan kesehatan masyarakat pengaturan masyarakat dalam rangka pencapaian berbagai tujuan kesehatan masyarakat pada hakekatnya adalah menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya yang ada didalam masyarakat itu sendiri untuk upaya-upaya preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif kesehatan mereka sendiri.

Pengorganisasian masyarakat dalam bentuk penghimpunan dan pengembangan potensi dan sumber-sumber daya masyarakat dalam konteks ini pada dasarnya merupakan menumbuhkan, membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan kesehatan. Pada faktanya, menggerakkan partisipasi masyarakat bukanlah perkara sederhana. Memerlukan pengertian, kesadaran, dan penghayatan oleh masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan mereka sendiri, serta upaya-upaya pemecahannya. Maka dari itu diperlukan pendidikan kesehatan masyarakat melalui pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan utama yang diajukan oleh Winslow dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kesehatan masyarakat pada hakekatnya merupakan salah satu strategi atau pendekatan pendidikan kesehatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Syukro al hamdanah dan Yustina Sriani, *Imu Kesehatan masyarakat*, <https://bukukesehatanblog.wordpress.com/2017/08/10/ilmu-kesehatan-masyarakat-buku-kesehatan/>, diakses tanggal 10 Januari 2020

Status kesehatan masyarakat sudah pasti dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Berdasarkan studi tentang kesehatan lingkungan tersirat informasi bahwa status kesehatan seseorang dipengaruhi oleh faktor hereditas, nutrisi, pelayanan kesehatan dan perilaku. belum menyertakan terkait kesehatan dari lima faktor diatas lingkungan mempunyai pengaruh dominan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan seseorang dapat berasal dari lingkungan pemukiman, lingkungan sosial, lingkungan rekreasi, dan lingkungan kerja. Keadaan kesehatan lingkungan di Indonesia tergolong kondisi yang perlu mendapat perhatian, karena menyebabkan status kesehatan masyarakat berubah.

Faktor yang perlu diperhatikan adalah peledakan penduduk, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah penggunaan pestisida, masalah gizi, masalah pemukiman, pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, populasi udara, abrasi pantai, penggundulan hutan dan banyak lagi permasalahan yang dapat menimbulkan satu model penyakit. Industrialisasi pada saat ini akan menimbulkan masalah yang baru. Jika aktivitas ini tidak segera ditanggulangi dengan sigap. Lingkungan industri merupakan salah satu contoh lingkungan kerja. Walaupun seorang karyawan hanya menggunakan sepertiga dari waktu hariannya

untuk melakukan pekerjaan di lingkungan industri, tetapi pemaparan dirinyadi lingkungan itu memungkinkan timbulnya gangguan kesehatan dengan risiko trauma fisik gangguan kesehatan morbiditas, disabilitas dan mortalitas.<sup>6</sup>

Perilaku hidupbersih dan sehat di rumah tangga merupakan upayauntuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan perilakuhidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

PHBS tatanan rumah tangga meliputi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, memberikan bayi ASI eksklusif, menimbang balita secara teratur, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, olahraga secara teratur, tidak merokok didalam rumah, dan membuang sampah pada tempatnya. Pada penelitian ini hanya tiga indikator yang diteliti meliputi: buang air besar di jamban, menggunakan air bersih, dan membuang sampah pada tempatnya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Kesehatan Lingkungan, Sanitasi dan Kesehatan, <https://bukukesehatanblog.wordpress.com/2017/08/10/buku-kesehatan-lingkungan-sanitasi-dan-kesehatan/>, Diakses Tanggal10 Januari 2020

<sup>7</sup> Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada Tatanan Rumah Tangga Masyarakat Using (Studi Kualitatif di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi),<file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/4347-1-8422-1-10-20170321.pdf>

Gambaran tentang bagaimana pendapat masyarakat dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dilingkungan Plalangan Kabupaten Jember yang disajikan dalam bentuk wawancara, baik sesuai dengan aturan pertanyaan maupun gambaran yang merupakan kesimpulan umum tentang pendapat masyarakat terhadap kekumuhan tersebut.

Jika melihatdata diatas bahwa penyumbang kondisi kekumuhan di Kelurahan Bintoro karena Pola Hidup masyarakatnya masih Jauh dari kata Sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat terpilih dilingkungan Plalangan sebagai Besar Masyarkat Tidak Paham Tentang apayang menjadi ciri permukiman Kumuh, Tetapi mereka menyadari bahwa Lingkungan yang Kotor dengan membuang Sampah disembarang Tempat, Kebutuhan Air bersih yang kurang dan Buang Air Besar tidak di jamban membuat permukiman mereka tidak Nyaman.

Setelah Terbitnya SK Bupati Nomor188.45/338/1.12/2016 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Jember Tertanggal 15 Juli 2016, Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang mendapat perhatian khusus dalam menuntaskan kumuhnya. Artinya banyak program pemerintah yang berupa bantuan jamban, pembangunan jalan, pembangunan rumah tidak layak huni, fasilitasi pengadaan

Air Bersih dan Persampahan diberikan Di Kelurahan Bintoro.<sup>8</sup>

Padatahun 2018, Kelurahan Bintoro memperoleh bantuan pemerintah berupa pembangunan air limbah sanitasi yang pembangunannya meliputi pembangunan jamban dan septictank komunal kepada Masyarakat yang tidak mampu yang tersebar diseluruh lingkungan kumuh, utamanya adalah di RT-RT yang masuk deliniasi Kumuh yang diantaranya adalah Lingkungan Plalangan. Termasuk Juga Pembangunan Perpipaan Air bersih dan Jalan Lingkungan.

Selain itu pada tahun 2019, Kelurahan Bintoro juga memperoleh anggaran dari APBN untuk penuntasan Kumuhnya. Dan juga bantuan pembangunan rumah layak huni bagi Lebih dari seratus rumah yang ada di kelurahan Bintoro. Mereka menyadari bahwa buang air besar tidak dijamin sangat beresiko, selain aurotnya dilihat orang bila malam hari harus ke sungai ada kekhawatiran digigit binatang melata. Dengan telah memperoleh bantuan jamban, masyarakat telah merubah pola hidupnya dengan sudah tidak lagi buang air besar disungai atau dipekarangan. Hal ini dilakukan juga dengan aktifnya kader kesehatan di kelurahan Bintoro memberikan sosialisasi tentang polahidup bersih dan sehat. Beberapa masyarakat yang tidak

memperoleh Bantuan karena mereka tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, sudah mulai mau mencontoh tetangganya yang membangun jamban.

Termasuk Juga dengan Kebutuhan air bersih yang selama ini sebelum ada bantuan Pemerintah yang ada dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan bantuan Pemerintah dari instansi terkait, pada kondisi bulan-bulan tertentu mereka harus mengambil air bersih dari sumber yang berjarak sekitar 2 Kilometer dari permukiman, tapi kini mereka tidak perlu lagi berjalan untuk mengambil air, karena telah memperoleh bantuan pembangunan Pipanisasi. Sehingga air sudah mengalir ke rumah seluruh masyarakat baik masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu secara ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kondisi awal angka kekumuhan disuatu wilayah serta adanya surat keputusan pemerintah untuk menjadikan suatu wilayah menjadi tidak kumuh mendorong kesadaran pada masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat yang telah dibangun sarana dan prasaranya mau menjaganya. Beberapa kriteria permukiman kumuh dan pola hidup bersih dan sehat yang terkait yaitu tentang ketersediaan jamban keluarga, terpenuhinya air bersih dan penanganan persampahan

---

<sup>8</sup> Sumber : wawancara dengan Lurah Kelurahan Bintoro

adalah menjadi bagian dari dua hal antara tidak lagi kumuh dan bisa dijalankannya pola hidup bersih dan sehat.

### DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015.

Doni Purnomo, Permukiman kumuh, pengertian dancirinya,

Ismoyowati, materi kuliah promosi kesehatan, Universitas Indonesia, 2009.

Kecamatan Patrang Dalam angka Dalam Angka Tahun 2015

Muhajir Syam, identifikasi kawasan kumuh dan strategi penanganannya pada permukiman di Kelurahan Rangsang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Tatanan Rumah Tangga Masyarakat Using (Studi Kualitatif Di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi),

Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI, Buku Saku Rumah Tangga Sehat dengan PHBS, Jakarta, 2007

Silas.J, Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Permukiman Marjinal.

Syukroal hamdanah dan Yustina Sriani Imu Kesehatan masyarakat,

### Undang-Undang

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.

Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Musfianawati** adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember sejak tahun 2006 sampai sekarang. Mengajar matakuliah Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Acara PTUN. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Jember tahun 2000 dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum tahun 2014 di Universitas Jember. Saat ini Musfianawati bisa di hubungi di nomor HP 082140260711 atau email di [musfianawati@gmail.com](mailto:musfianawati@gmail.com).

**Firda Laily Mufid** adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember sejak tahun 2016 sampai sekarang. Mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Internasional. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember tahun 2010 dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum tahun 2015 di Universitas Jember. Firda Laily Mufid bisa dihubungi di nomor HP 081233705411.